



# 2022

## LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH LAKIP

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**Kabupaten Polewali Mandar**

✉ [dinasperpusarsip@polmankab.go.id](mailto:dinasperpusarsip@polmankab.go.id)

🌐 [www.dpk.polmankab.go.id](http://www.dpk.polmankab.go.id)



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Diharapkan dengan adanya Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan yang lebih baik lagi.



Untuk tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai 5 (lima) sasaran Strategis yaitu :

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%
1	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah</b>	Sangat Baik	Sangat Baik	100
	Indeks Kualitas Layanan Perpustakaan			
2	<b>Terwujudnya Tata Kelola Arsip Sesuai Standar</b>	Baik	Baik	100
	Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah			
3	<b>Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran</b>	Sangat Baik	Sangat Baik	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder			
4	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja</b>	BB	BB	100
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah			
5	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	WTP	WTP	100
	Opini Pengelolaan Keuangan			
<b>Kinerja Rata-Rata</b>			<b>100%</b>	



Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 13.074.436.883,- dan terealisasi Rp 12.379.444.692,- atau persentase realisasi 95%. Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100% serta capaian kinerja keuangan sebesar 95%. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 0,05%

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022. LAKIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar merupakan Perencanaan Kinerja Tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 serta mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2024, **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**.

Dalam laporan ini terdapat aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan, dan untuk pengukurannya, terdapat perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024.

Diharapkan dengan adanya Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk hasil yang lebih optimal.



Kepala Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan,

*[Handwritten signature]*  
s. Aco Djalaluddin. AM, M.Si

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Umum.....	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	4
C. Isu Strategis Organisasi.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja 2022 .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	16
B. Akuntabilitas Keuangan .....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>37</b>

# Daftar Gambar, Tabel dan Chart

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	6
Tabel 1.1	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon/Pejabat .....	6
Tabel 1.2	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan .....	6
Tabel 1.3	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Tabel 1.4	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Genre .....	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Tabel 2.4	Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	15
Tabel 3.1	Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 .....	29
Tabel 3.2	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022.....	36
Chart 3.1	Jumlah Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan tahun 2018-2022.....	17
Chart 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 serta Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021-2022 dan Target Renstra (akhir).....	19
Chart 3.3	Data Jumlah Koleksi Buku dan Jumlah Judul Buku di perpustakaan Umum Daerah Tahun 2018-2022 .....	20
Chart 3.4	Data Jumlah Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Keliling tahun 2019-2022.....	21
Chart 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya Kualitas Arsip Sesuai Standar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 Target dengan Realisasi 2022 dan Target Renstra (akhir) .....	26



Chart 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2021-2022 dan Target Renstra (akhir).....	30
Chart 3.7	Perkembangan Implementasi SAKIP .....	32
Chart 3.8	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 .....	35



## A. UMUM

# 1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja.



Laporan yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LAKIP. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LAKIP. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Untuk Memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan strategi dapat dipenuhi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar yang selaras tiap tahunnya ditetapkan dengan program dan kegiatan. Maka, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas untuk upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



- b. Merupakan sarana bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar untuk menyampaikan pertanggungjawaban capaian kinerja program kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Penyusunan LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan yang diharapkan melalui penyusunan LAKIP ini adalah tersedianya bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi selanjutnya dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

### 3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 ini, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar
- g. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar

## B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas *membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi layanan Perpustakaan dan Kearsipan.*

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan Perpustakaan dan Kearsipan;

- b. pelaksanaan kebijakan Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat**, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan.
- c. **Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca**, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
  - 2. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- d. **Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan**, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
  - 2. Seksi Pelayanan Perpustakaan.
- e. **Bidang Kearsipan**, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengelolaan Arsip; dan
  - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh aparat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Eselon/Jabatan/Fungsional

Tabel 1.1 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon/Pejabat

GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I	-	-	-
II	1	-	1
III	-	3	3
IV	-	1	1
FUNGSIONAL	2	-	2
JUMLAH	3	4	7

b. Berdasarkan Golongan:

**Tabel 1.2 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan**

GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I	-	-	-
II	1	2	3
III	4	10	14
IV	1	2	3
JUMLAH	6	14	20

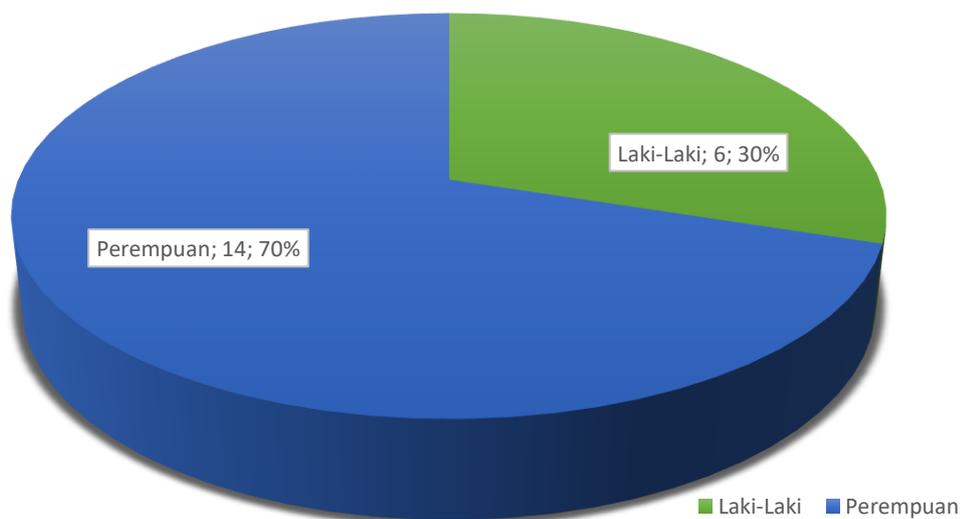
c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

**Tabel 1.3 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan**

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD	-	-	-
SMP/ Sederajat	-	-	-
SLTA/Sederajat	1	3	4
Sarjana Muda/D3	0	1	1
Strata 1 (S1)	4	6	10
Strata 2 (S2)	1	4	5
Jumlah	6	14	20

d. Berdasarkan Gender / Jenis Kelamin

**Tabel 1.4 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Gender**



## C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja**
  - Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana kerja para ASN di semua bidang serta pelayanan perpustakaan
2. **Optimalisasi Teknologi Informasi**
  - Belum optimalnya SDM dalam menggunakan layanan Teknologi terutama Aplikasi yang berasal dari Perpustakaan Nasional RI
  - SDM yang kurang dalam hal Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. **Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur**
  - Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan layanan perpustakaan dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi
  - Lemahnya SDM yang mengerti Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
  - Kurangnya SDM di segala bidang.
  - Kurangnya SDM yang mumpuni dalam hal pekerjaan.
4. **Optimalisasi Kualitas Manajemen Organisasi**
  - Dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Polewali Mandar, diperlukan penataan manajemen yang berkualitas pada semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.





Kabupaten Polewali Mandar serta budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Rumusan visi mencakup dua pokok visi, yaitu Maju dan Rakyat Sejahtera. Kedua pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada tahun 2024.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat **Misi** pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk menjalankan misi keempat secara optimal, yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Modern”. Untuk menjabarkan pelaksanaan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Keuangan yang digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

VISI :		POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA	
MISI :		MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERKUALITAS DAN MODERN	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas Layanan perpustakaan daerah	1. Meningkatnya kualitas Layanan perpustakaan daerah	1. Meningkatkan Pembinaan Layanan perpustakaan daerah	1. Mengoptimalkan Pembinaan Layanan perpustakaan daerah
2. Mewujudkan tata kelola arsip sesuai standar	2. Terwujudnya tata kelola arsip sesuai standar	2. Melakukan penataan pengelolaan arsip sesuai standar	2. Mengoptimalkan penataan pengelolaan arsip sesuai standar
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	3. Melakukan penataan manajemen organisasi secara menyeluruh	3. Mengoptimalkan penataan manajemen organisasi
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	4. Meningkatkan pencapaian kinerja perangkat daerah	4. Mengoptimalkan penataan manajemen organisasi
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	5. Mengelola keuangan perangkat daerah secara tertib, efektif, dan efisien	5. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :

**01**

**Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah**

**Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan**

**02**

**Sasaran Strategis : Terwujudnya tata kelola arsip sesuai standar**

**Indikator Kinerja : Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah**

**03**

**Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**

**Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder**

**04**

**Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**

**Indikator Kinerja : Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

**05**

**Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**

**Indikator Kinerja : Opini Pengelolaan Keuangan**

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>	Meningkatnya kualitas Layanan perpustakaan daerah	Indeks Kepuasan layanan Perpustakaan	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Terwujudnya tata kelola arsip sesuai standar	Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah	40	61	65	76	86
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019–2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar menyusun suatu Rencana Kinerja (*performance plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan dari proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Selain dari RKT, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar juga membuat Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang

menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja atau yang berganti menjadi Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu :

#### **a. Sasaran Strategis**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan harus berorientasi hasil.

#### **b. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

#### **c. Target**

Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.

Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Daerah	Indeks Kepuasan layanan Perpustakaan	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas arsip daerah	Predikat pengelolaan kearsipan	Baik
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%
	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 10.559.553.100
Meningkatnya kualitas arsip daerah	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 74.616.700
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.440.267.083
Jumlah		<b>Rp. 13.074.436.883</b>



#### A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Tahun 2021 merupakan masa transisi dari Renstra 2014 – 2019 ke Renstra 2019 – 2024. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2024.

**01**

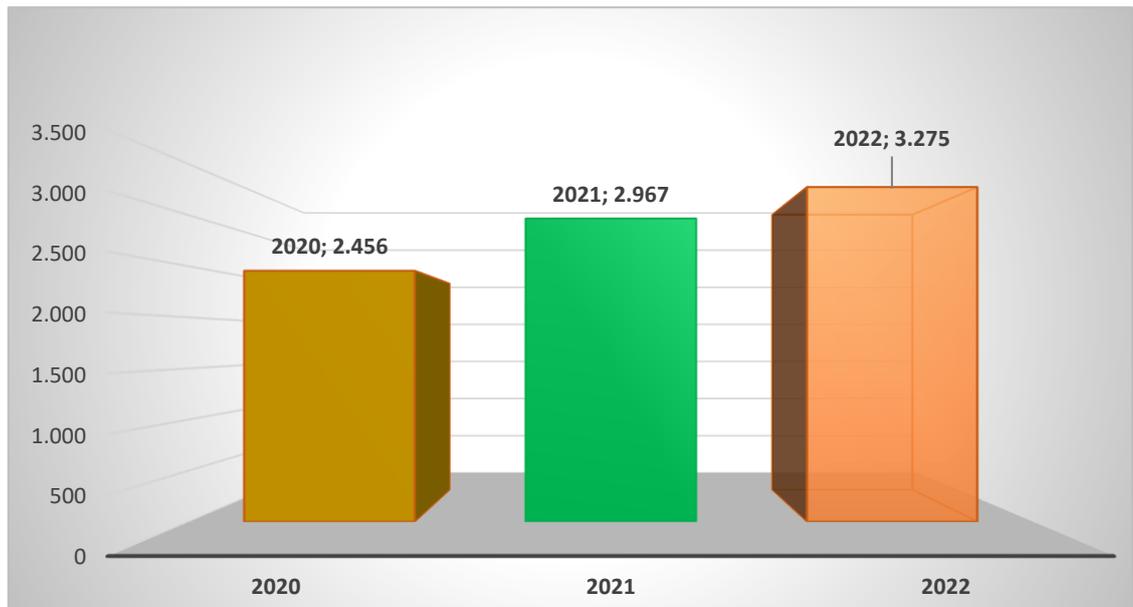
**Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah**

**Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan**

**Target : Baik**

Dengan adanya program Transformasi berbasis Inklusi sosial yang telah dijalankan dalam beberapa tahun belakang ini, kegiatan layanan perpustakaan sebagai jembatan antara bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dengan pemakai yang membutuhkannya guna mengoptimalkan pemanfaatan bahan atau sumber informasi yang ada. Disamping itu idealnya pelayanan di perpustakaan itu dapat lebih bersahabat, cepat dan akurat dimana pelayanan perpustakaan harus didasarkan kepada kebutuhan pengguna sebagai antisipasi perkembangan teknologi informasi dan pelayanan yang ramah. Untuk data jumlah pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020-2022 dapat dilihat pada table berikut ini :

Chart 3.1  
Data Jumlah Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020-2022



Berdasarkan Chart diatas, terlihat pemustaka/pengunjung perpustakaan yang cukup besar di tahun 2022. Tahun 2020 jumlah pemustaka sebanyak 2.456 dan tahun 2022 sebanyak 3.275. Jumlah pemustaka/pengunjung perpustakaan mulai terlihat ada kenaikan di banding 2021 disebabkan kabupaten Polewali Mandar sudah berangsur normal setelah pandemi covid di tahun kemarin.

Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang semakin baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yaitu indeks kepuasan pengguna layanan. Metode pengukuran indeks kepuasan masyarakat / pengguna layanan (IKM) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran *'Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah'* yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Pada Tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk sekian kalinya mengukur IKM. Survey dilakukan secara mandiri dengan membagikan kuesioner kepada para pengguna layanan. Secara umum, hasil pengukuran survei IKM menunjukkan nilai sangat baik. Hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat dibawah ini :

Unsur Layanan	Layanan Perpustakaan Daerah			
1. Persyaratan	3.94			
2. Prosedur	3.96			
3. Waktu Pelayanan	3.88			
4. Biaya/tarif	4			
5. Produk Layanan	3.97			
6. Kompetensi Pelaksana	3.86			
7. Perilaku Pelaksana	3.97			
8. Sarana dan Prasarana	3.61			
9. Penanganan dan Pengaduan	4			
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>97,75</b>			
D (Tidak Baik)	C (Kurang Baik)	B (Baik)	A (Sangat Baik)	
25,00 - 64,99	65,00 - 76,60	76,61 - 88,30	88,31 - 100,00	

Terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 mencapai indeks 97,75 atau predikat kinerja layanan ‘Sangat Baik’. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu Predikat ‘Baik’. Untuk Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2020-2021 dan Target Renstra (akhir) dapat dilihat pada chart berikut ini :

Pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan kearsipan kabupaten Polewali Mandar mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk pembangunan gedung Perpustakaan melalui dana dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp. 10.000.000.000 (*sepuluh milyar*). Pembangunan Gedung Perpustakaan bertempat di area Gelanggang olahraga (GOR) Sport Center jalan HOS. Cokroaminoto.



Perpustakaan Daerah Polewali Mandar



Lahan Pembangunan Gedung Perpustakaan



Perpustakaan Daerah Polewali Mandar



Perpustakaan Daerah Polewali Mandar

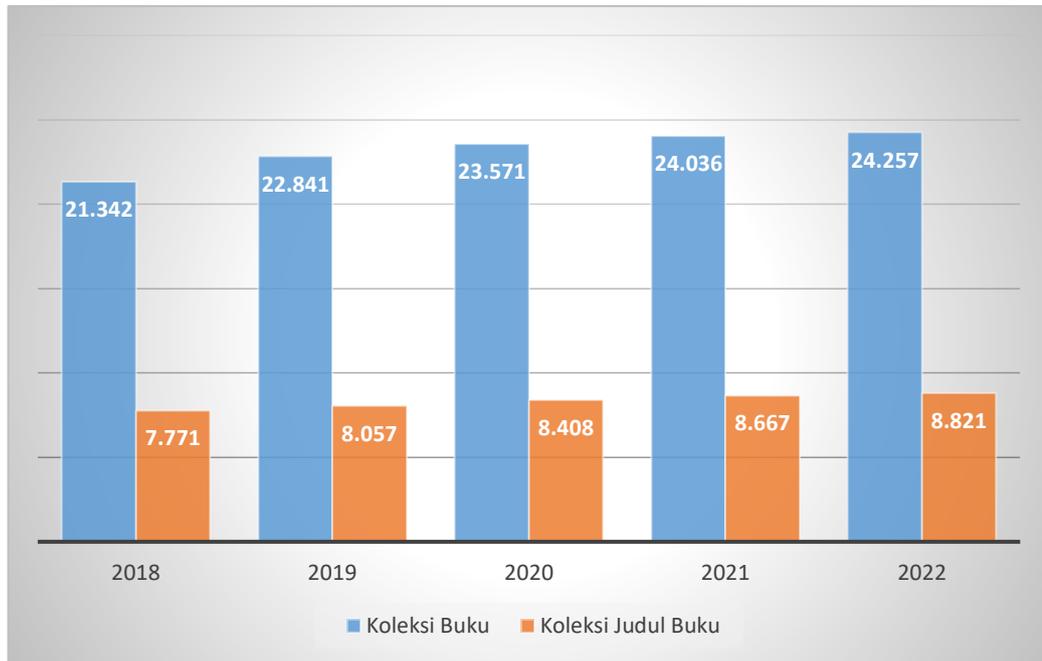
Chart 3.2  
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 serta Perbandingan  
Target dengan Realisasi 2021-2022 dan Target Renstra (akhir)



Mencermati chart diatas, maka ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2022 ini meningkat 97,75% yang mana pada tahun 2021 nilai kepuasan berada di indeks 86,53. Selanjutnya, capaian tahun 2022 ini menunjukkan sudah tercapai 97,75 % dari target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019-2024.

Untuk penyediaan bahan pustaka Perpustakaan umum daerah, dapat dilihat dari jumlah koleksi buku dan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan dari tahun 2018-2022 sebagaimana pada chart berikut ini :

Chart 3.3  
Data Jumlah Koleksi Buku dan Jumlah Judul Buku di Perpustakaan Umum Daerah  
Tahun 2018-2022

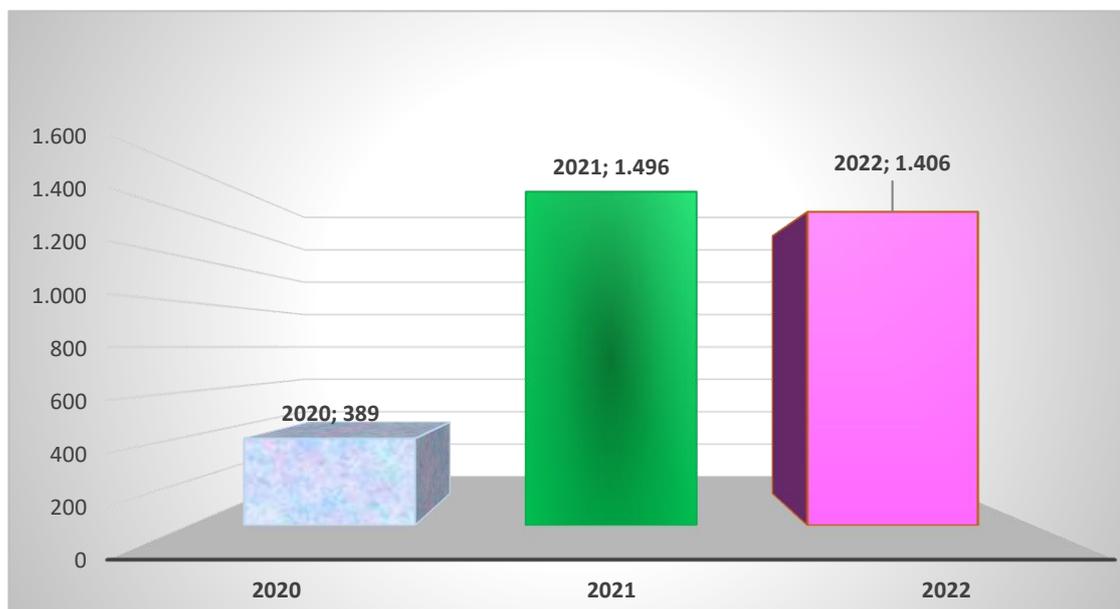


Mencermati chart diatas, terlihat bahwa dari tahun 2018 – 2022 jumlah koleksi buku dan judul buku di Perpustakaan umum daerah semakin bertambah. Untuk tahun 2021 jumlah koleksi buku sebanyak 23.909 dan jumlah judul buku sebanyak 8.667 Untuk tahun 2022 jumlah koleksi buku sebanyak 24.257 dan jumlah judul buku sebanyak 8.821 atau dengan persentase jumlah koleksi buku meningkat sebesar

96,90% dan jumlah judul buku meningkat sebesar 95,82%. Diharapkan dengan meningkatnya jumlah judul koleksi buku dan jumlah judul buku dapat berpengaruh pada meningkatnya minat baca masyarakat untuk ke Perpustakaan umum daerah.

Untuk Pelayanan perpustakaan keliling telah dilakukan setiap tahunnya di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk data jumlah pemustaka pada pelayanan perpustakaan keliling 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Chart 3.4**  
**Data Jumlah Pemustaka/Pengunjung Perpustakaan Keliling**  
**Tahun 2020-2022**



Berdasarkan Chart diatas, terlihat pemustaka/pengunjung perpustakaan keliling yang cukup besar dari tahun 2021. Tahun 2021 jumlah pemustaka sebanyak 1.496 dan tahun 2022



sebanyak 1406. Jumlah pemustaka/ pengunjung perpustakaan keliling terlihat menurun di tahun 2022 di sebabkan adanya refocusing anggaran yang berdampak kepada perpustakaan keliling.

Untuk jumlah kunjungan layanan perpustakaan keliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada data berikut ini :

Kecamatan	Jumlah Kunjungan		
	2020	2021	2022
a. KECAMATAN POLEWALI		1	
b. KECAMATAN WONOMULYO	1	3	4
c. KECAMATAN CAMPALAGIAN	1	4	1
d. KECAMATAN TINAMBUNG		2	1
e. KECAMATAN BINUANG	1	5	4
f. KECAMATAN TAPANGO			1
g. KECAMATAN MAPILLI		2	1
h. KECAMATAN LUYO		4	
i. KECAMATAN BALANIPA	1	2	2
j. KECAMATAN LIMBORO		1	
k. KECAMATAN ALLU	1		1
l. KECAMATAN ANREAPI		3	
m. KECAMATAN MATAKALI		2	2
n. KECAMATAN BULO	1	1	
o. KECAMATAN TUTAR			1
<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>18</b>

Untuk tahun 2022 jumlah kunjungan hanya dilakukan sebanyak 18 kali ke 10 kecamatan karena dampak dari refocusing anggaran.

## ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN



Faktor Penunjang :

- a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada para pemustaka
- b. Meningkatnya animo masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan
- c. Adanya pembangunan gedung baru perpustakaan

Faktor Penghambat :

- a. Gedung Layanan Perpustakaan masih status pinjam pakai dan kondisi kurang memadai
- b. Kurangnya SDM yang sesuai kebutuhan
- c. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan
- d. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

Solusi :

- a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai
- b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja
- c. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai
- d. Percepatan pembangunan gedung perpustakaan



Adapun Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas layanan Perpustakaan daerah, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Pelayanan Perpustakaan</b>	<b>Rp. 10.559.553.100</b>	<b>Rp. 9.958.691.546</b>	95
a. Pembinaan Perpustakaan	Rp. 10.290.272.200	Rp. 9.689.699.349	94
b. Pelayanan Perpustakaan Keliling	Rp. 70.786.700	Rp. 70.785.372	100
c. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Rp. 108.795.300	Rp. 108.602.025	100
d. Pembinaan komunitas literasi	Rp. 37.037.300	Rp. 36.997.200	100
e. Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Rp. 52.661.600	Rp. 52.607.600	100

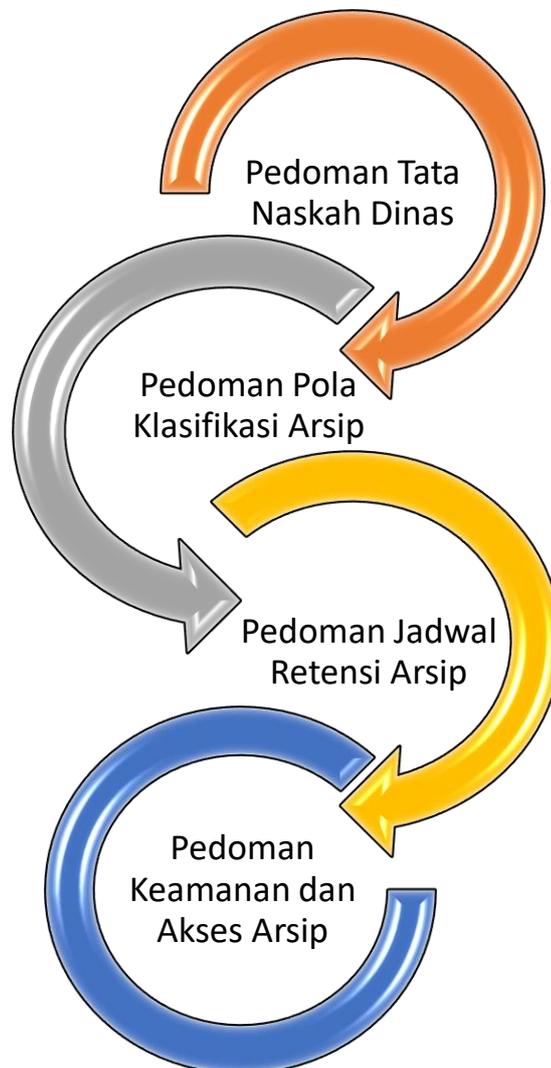
02

**Sasaran Strategis : Terwujudnya tata kelola arsip sesuai standar**

**Indikator Kinerja : Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah**

**Target : 65 %**

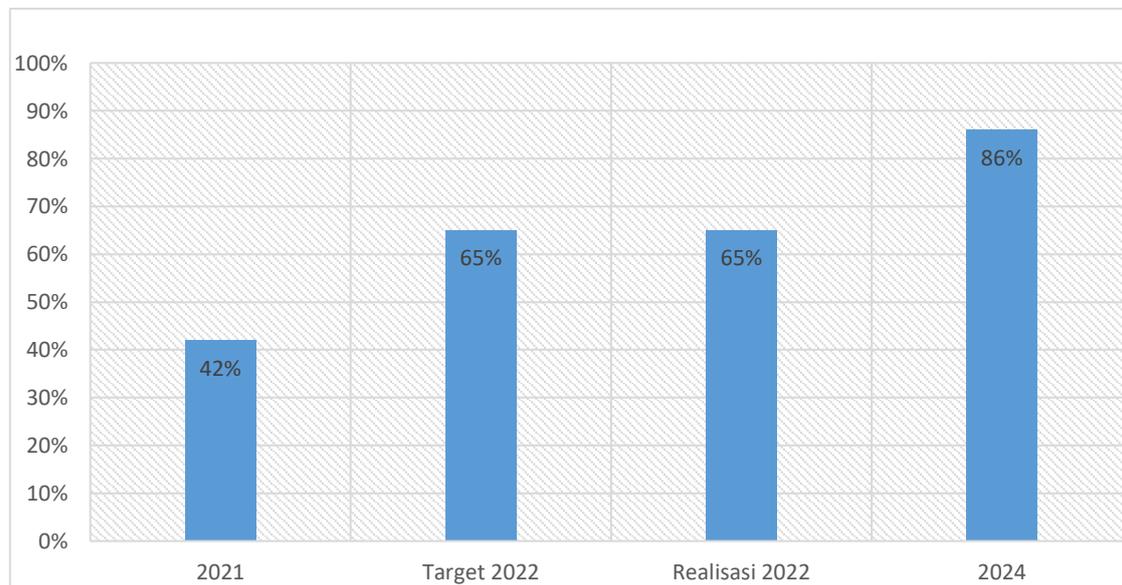
Pengelolaan arsip harus dilakukan dengan baik dengan mengikuti aturan yang berlaku, konsistensi dan kontinuitas dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didasarkan pada 4 pilar pengelolaan arsip, yaitu :



Adapun data pengelolaan Arsip sesuai standar yang telah dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	Jumlah Arsip (SK Bupati, Surat Edaran, Surat Masuk dan Surat Keluar)
1	OPD	196 Surat
2	Kecamatan	76 Surat
3	Kelurahan	35 Surat
4	Desa	222 Surat
Jumlah		529
Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah		65%

Chart 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya Kualitas Arsip Sesuai Standar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2021 dan Target Renstra (akhir)



Capaian Kinerja dasar 2021-2022 Meningkat  
**33%**

Capaian kinerja dasar target = 65%  
65% **100%**

Capaian Kinerja target akhir Renstra = 65%  
86% **79,26%**

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan capaian 2022 dengan target 2022, maka kinerja Kualitas Arsip Sesuai Standar tahun 2022 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2022 ini meningkat sebesar 2 % dari kondisi tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi 86%, maka kinerja tahun 2022 sudah mencapai 79,26%.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

#### Faktor Penunjang :

- a. Tersedianya kebijakan pemerintah berupa Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
- b. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Bidang Kearsipan untuk memberikan layanan kearsipan

#### Faktor Penghambat :

- a. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai
- b. Ruang arsip yang tidak sesuai dengan standar karena ruangan yang tidak memadai
- c. Kurangnya SDM yang sesuai kebutuhan
- d. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

#### Solusi :

- a. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja
- b. Penataan ruang arsip yang sesuai dengan standar
- c. Perlu adanya Arsiparis yang betul-betul memahami tentang kearsipan
- d. Memberi kesempatan kepada PNS dan non PNS untuk mengikuti bimbingan teknis baik formal maupun non formal



Ruang Penyimpanan Arsip

Adapun Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Terwujudnya Tata Kelola Arsip Sesuai Standar, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Peningkatan Kualitas Kearsipan Pemerintah Daerah</b>	Rp. 74.616.700	Rp. 74.530.600	100
a. Akuisisi Penarikan Arsip Statis Perangkat daerah	Rp. 42.875.300	Rp. 42.819.200	100
b. Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip	Rp. 31.741.400	Rp. 31.711.400	100

**03**

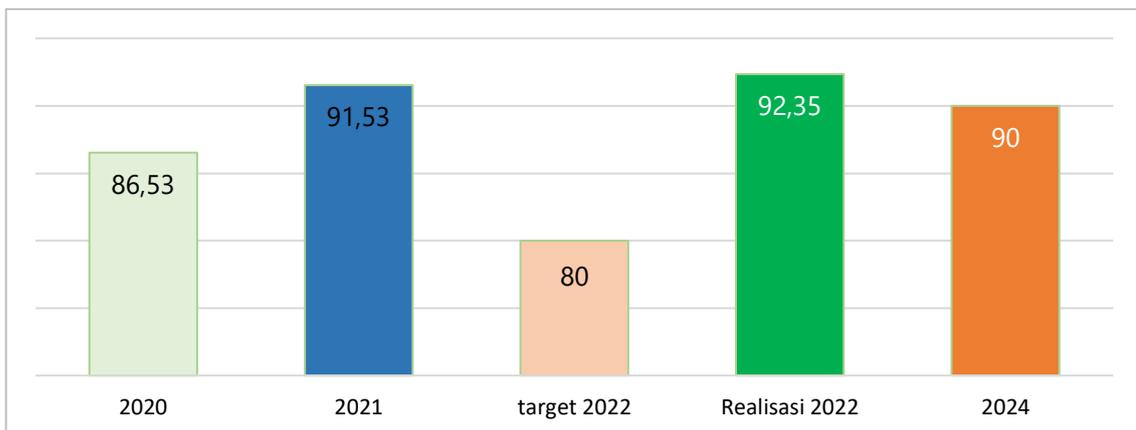
**Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**

**Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder**

**Target : Baik**

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan semakin membaik. Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Chart 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2021-2022 dan Target Renstra (akhir)**



**Capaian Kinerja 2021-2022, Meningkatkan :**

**82%**

**Capaian Kinerja target-realisasi 2022**

=  $\frac{92,35}{80}$  **115,4%**

**Capaian Kinerja target Akhir Renstra**

=  $\frac{92,35}{90}$  **102,6%**

Mencermati Tabel dan Chart terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholders layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 mencapai indeks 92.35 atau predikat kinerja layanan ‘Sangat Baik’. Capaian ini meningkat dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu Predikat Baik. Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2022 ini meningkat 82% yang mana pada tahun 2021 nilai kepuasan berada di indeks 115.4%. Selanjutnya, capaian tahun 2022 ini menunjukkan sudah tercapai 102,6 % dari target jangka menengah yang tertuang dalam *Renstra* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019-2024.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

#### Faktor Penunjang :

- a. Tingginya motivasi kerja Pegawai
- b. Adanya perkembangan teknologi dan informasi
- c. Meningkatnya animo masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan arsip

#### Faktor Penghambat :

- a. Gedung Layanan Perpustakaan masih status pinjam pakai dan kondisi kurang memadai
- b. Kurangnya SDM yang sesuai kebutuhan
- b. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan
- c. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

#### Solusi :

- a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai
- b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja
- c. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja
- d. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai



Adapun Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Manajemen Perkantoran</b>	<b>Rp 347.387.100</b>	<b>Rp 342.665.894</b>	<b>99</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.502.600	Rp 1.502.600	100
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Rp 34.525.900	Rp 34.525.900	100
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Rp 520.400	Rp 520.400	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 9.263.000	Rp 9.203.000	99
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 16.930.200	Rp 16.930.200	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp 8.760.000	Rp 8.760.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 127.567.500	Rp 126.966.094	100
Pengadaan Mebel	Rp 1.697.600	Rp 1.697.600	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 37.731.000	Rp 37.731.000	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.578.000	Rp 11.578.000	100
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Rp 420.000	Rp 420.000	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 23.197.000	Rp 23.197.000	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 69.593.900	Rp 65.534.100	94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 4.100.000	Rp 4.100.000	100



04

**Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**

**Indikator Kinerja : Predikat Sakip Perangkat Daerah**

**Target : “ B “**

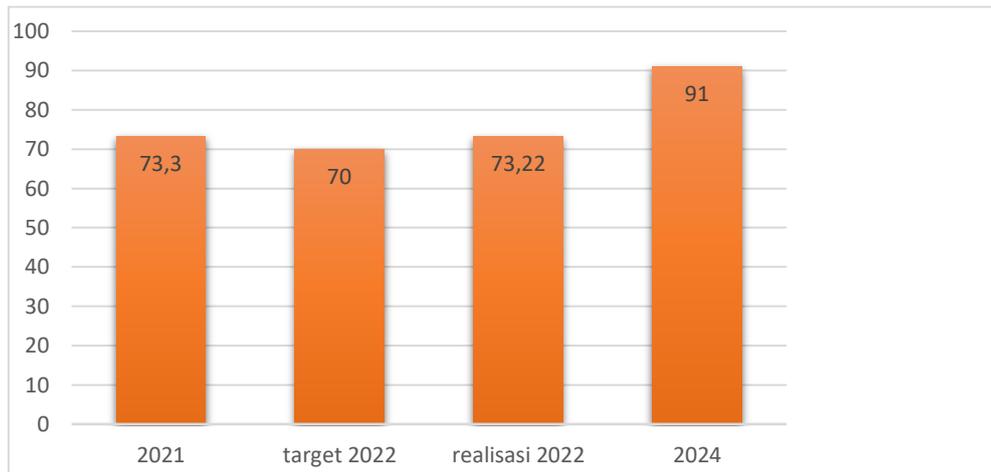
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator

Komponen SAKIP	2021	2022
Perencanaan Kinerja	28,8	28,3
Pengukuran Kinerja	20,94	21,25
Pelaporan Kinerja	9,18	9,26
Evaluasi Internal	3,88	3,91
Capaian Kinerja	10,50	10,50
Nilai	73,30	73,22
Predikat	BB	BB

sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan rewiuw oleh Inspektorat.

Adapun capaian Implementasi SAKIP Dinas Perpustakaan dan kearsipan, dapat digambarkan melalui Chart berikut ini :

Chart 3.7  
Perkembangan Implementasi SAKIP



**Capaian Kinerja  
2021-2022,  
Meningkat :**  
**100%**

**Capaian Kinerja  
target-realisasi 2022**  
 $= \frac{73,22}{70}$  **95.60%**

**Capaian Kinerja  
target Akhir Renstra**  
 $= \frac{73,22}{91}$  **124,3%**

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja harus selalu ditingkatkan agar kedepan kualitas penerapan SAKIP semakin membaik.

#### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p><b>Faktor Penunjang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat</li> <li>b. Tersedianya aplikasi e-SAKIP</li> </ul>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja</li> <li>b. Belum tertibnya pelaksanaan pengukuran kinerja</li> </ul>
<p><b>Solusi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja</li> <li>b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi</li> </ul>	

Adapun Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan</b>	Rp 33.196.800	Rp 33.196.800	100
Penyusunan Dokumen perencanaan, Perangkat Daerah	Rp 4.241.200	Rp 4.241.200	100
Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Rp 12.828.500	Rp 12.828.500	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.928.100	Rp 2.928.100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.214.700	Rp 2.214.700	100
Kordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran Skpd	Rp 10.984.300	Rp 10.984.300	100



**05**

**Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

**Indikator Kinerja : Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

**Target : WTP**

Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2022 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

## Analisis keberhasilan dan kegagalan

<b>Faktor Penunjang :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur</li><li>b. Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah</li></ul>	<b>Faktor Penghambat :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan</li><li>b. Belum optimalnya tertib administrasi asset</li></ul>
<b>Solusi :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan asset</li><li>b. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan</li></ul>	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

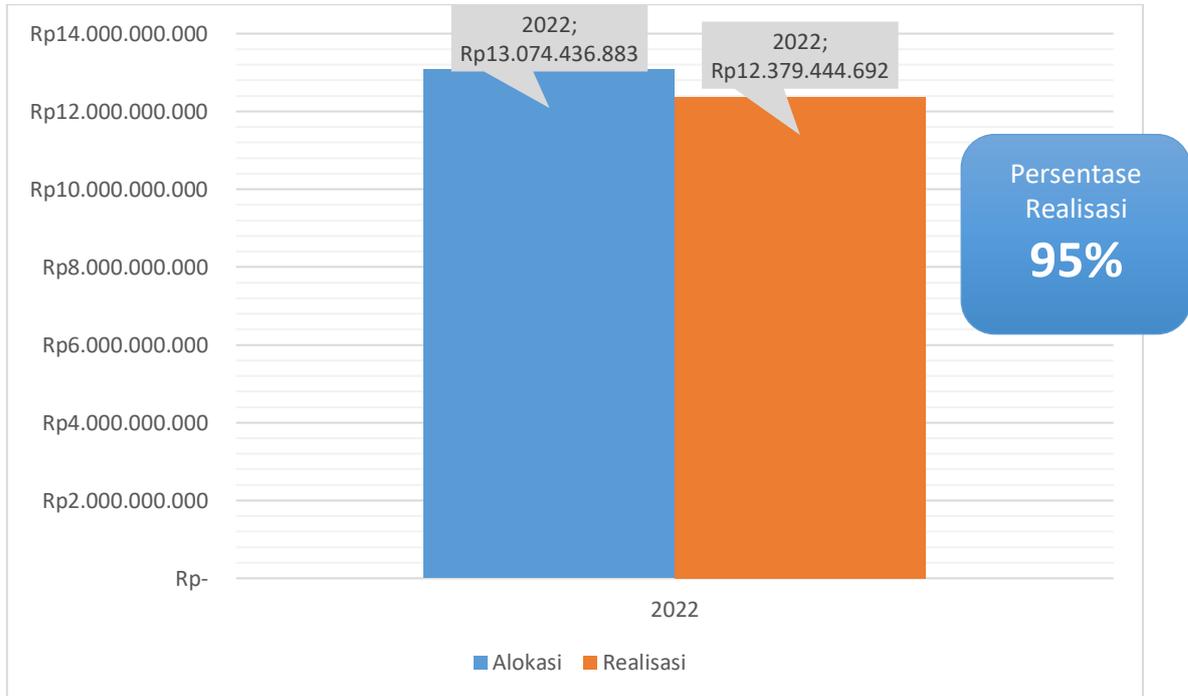
Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.456.400	Rp 1.456.400	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.456.400	Rp 1.456.400	100

## B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dapat disajikan sebagai berikut :

Chart 3.8  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Tahun 2022



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022, maka dapat diamati melalui Tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah</b>	100	100	100	10.559.553.100	9.958.691.546	94,16	5.69	Program Pelayanan Perpustakaan
	Indeks Kualitas Layanan Perpustakaan								
2	<b>Terwujudnya Tata Kelola Arsip Sesuai Standar</b>	100	100	100	74.616.700	74.530.600	99,88	0.12	Program Peningkatan Kualitas Kearsipan Pemerintah Daerah
	Cakupan Pemenuhan Standar Pengelolaan Arsip Daerah								
3	<b>Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran</b>	100	100	100	347.387.100	342.665.894	98.64	1.36	Program Manajemen Perkantoran
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder								
4	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja</b>	100	100	100	33.196.800	33.196.800	100	0.00	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah								
5	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	WTP	WTP	100	1.456.400	1.456.400	100	0,00	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Opini Pengelolaan Keuangan								
<b>JUMLAH</b>				<b>100</b>	<b>11.016.210.100</b>	<b>10.410.541.240</b>	<b>94,50</b>	<b>7,2</b>	

Mencermati tabel diatas rata-rata realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 sebesar 100%, maka hal ini menunjukkan terjadinya efisiensi penggunaan dana sebesar 7,2%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 94,50% telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 100%

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Polewali Mandar yaitu **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**. Penyusunan LAKIP Perpustakaan dan Kearsipan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternatif solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100% serta capaian kinerja keuangan

sebesar 94,50%. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 7,2%.

Ada beberapa kendala yang masih dijumpai yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

- a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah dan peningkatan minat dan budaya baca
- b. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik
- c. Optimalisasi peningkatan kualitas penataan arsip daerah sesuai standar pengelolaan arsip
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan arsip sesuai system dan prosedur kearsipan
- e. Optimalisasi penguatan kapasitas SDM pengelola Perpustakaan dan kearsipan



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.



Wakil Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

Drs. Aco Dialaluddin. AM, M.Si